

**ANALISIS LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN *OPERATION GREEN*
FENCE (OGF) TERHADAP PEMBATASAN IMPOR SAMPAH
ELEKTRONIK DI CINA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna Memeperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politok Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional*

Oleh:

SITI SHINTA ISMAIL

4518023022

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Analisis Langkah-Langkah Kebijakan *Operation Green Fence* (OGF) terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik di Cina

Nama Mahasiswa : Siti Shinta Ismail

Nomor Stambuk : 4518023022

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

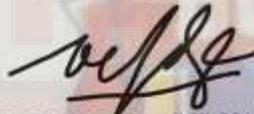
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 19 Agustus 2022

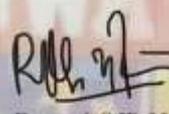
Menyetujui ;

Pembimbing I



Zulkhair Burhan, S.IP.,MA.
NIDN. 0903048101

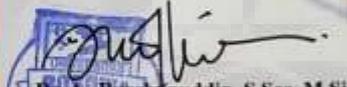
Pembimbing II



Rosnani, S.IP.,MA.
NIDN. 0930018001

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar


Dr. A. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional


Muh. Asy'ari, S.IP.,MA.
NIDN. 0908088806

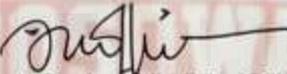
HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi **Analisis Langkah -Langkah Kebijakan Operation Green Fence (OGF) terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik di Cina**

Nama : Siti Shinta Ismail
 Nomor Stambuk : 4518023022
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

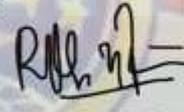
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Pengawas Umum:


 Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si

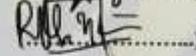
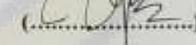
Panitia Ujian :


 Zulkhair Burhan, S.IP.,MA.
 Ketua


 Rosnani, S.IP.,MA.
 Sekretaris

Tim Penguji :

1. Zulkhair Burhan, S.IP.,MA
2. Rosnani, S.IP.,MA
3. Beche BT. Mamma, S.IP.,MA.
4. Muh. Asy'ari, S.IP.,MA.

.....
.....
.....
.....

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya serta sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Langkah-Langkah Kebijakan *Operation Green Fence* Terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik di Cina”. Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasihat, kritik dan saran yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

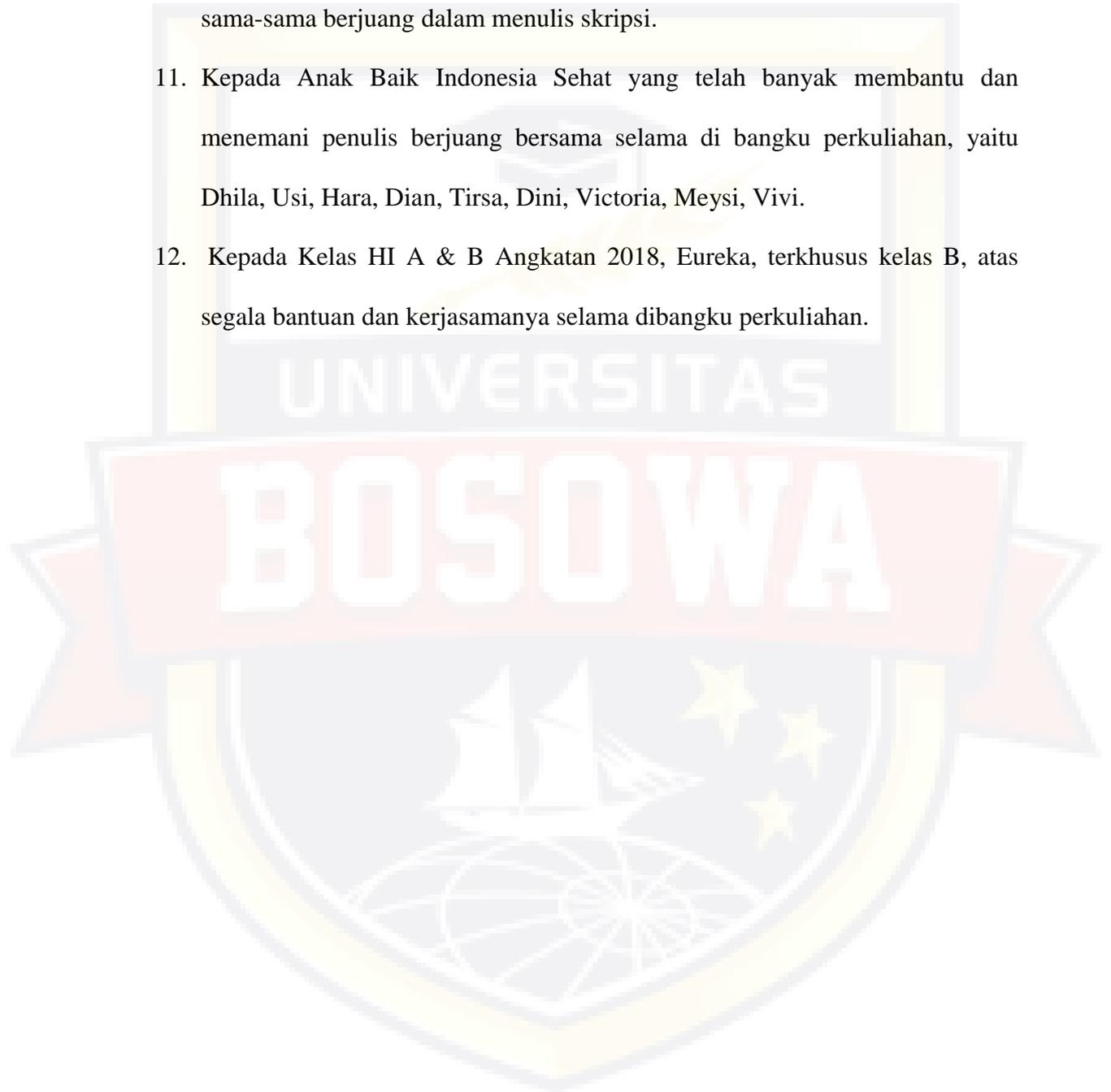
1. Kedua orang tua, untuk Ayahanda Ismail Karim dan Ibunda Sitiani Ismail tercinta yang senantiasa selalu mendukung saya baik secara moril maupun secara materil dan juga atas segala bantuan, bimbingan, dorongan serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Kakak-kakak penulis Fahrian Ismail S.P dan Nur Devi Ismail, S.E tercinta yang senantiasa selalu memberi motivasi baik secara moril maupun secara materil dan selalu menjadi tempat penulis berkeluh-kesah.
3. Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A & Ibu Rosnani, S.IP., MA. selaku

pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas saran serta kritikan yang tentunya membangun agar skripsi ini diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih juga atas kesediaan waktu untuk diskusi dan konsultasi selama pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak Muh. Asy'ari, S.IP., M.A selaku Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih atas segala nasehat – nasehat beliau yang akan selalu bermanfaat bagi penulis kedepannya.
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen, Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A., Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A., Bapak Asy'ari Mukrim, S.IP., M.A., Bapak Ahmad Tarikhul Haq, S.IP., MA., Bapak M. Fahmi B. Fauzi, S.IP., MA., Ibu Beche Bt. Mamma, S.IP., MA., Ibu Finahliyah Hasan, S.IP., MA., Ibu Rosnani, S.IP., MA., Ibu Fivi Elvira Basri, S.IP., MA., Ibu Noor Fahmi Pramudji, S.IP., MA., Ibu Ayu Kartika JT, S.IP., MA., dan Ibu Dina M. Lungkang, S.IP., MA.
6. Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Pak Budi dan Ibu Mega yang telah banyak membantu segala adminitrasi penulis.
7. Seluruh Keluarga besar Karim Tarafannur yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala doa baik dan dorongan motivasi yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada RHEFAMPIN selaku sahabat – sahabat penulis yang terkasih, yaitu Rafika, Hani, Magfira, Asriyani, Aida, Annisa, Marwa, Pomet, Ikka, Nisa, Wiwin dan Kintan.
9. Kepada Dhila dan Usi yang dengan tulus membatu penulis di saat-saat tersulit

dalam menulis skripsi.

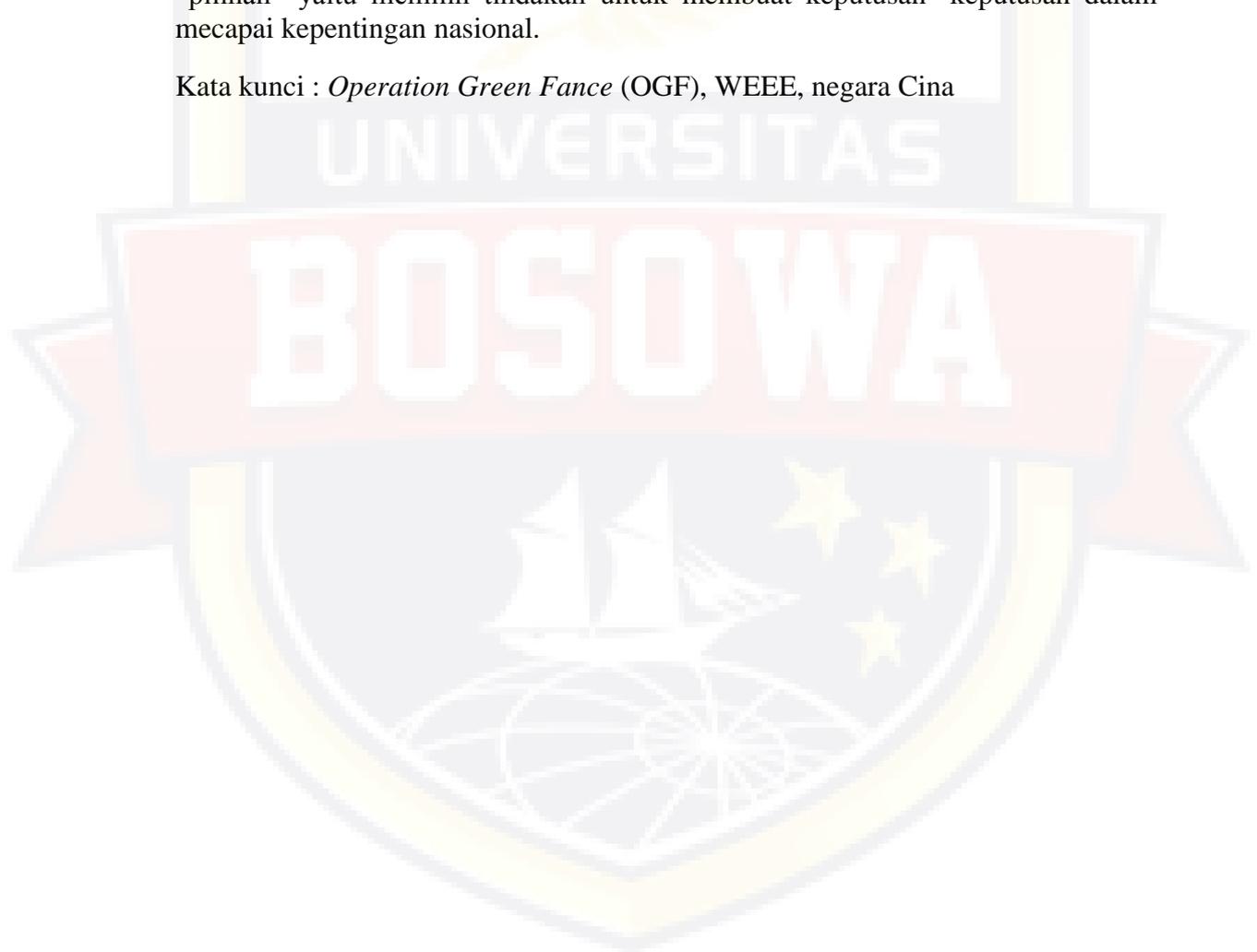
10. Kepada Hara, Dini, Nanda, Khairul dan Ain yang menemani penulis dan sama-sama berjuang dalam menulis skripsi.
11. Kepada Anak Baik Indonesia Sehat yang telah banyak membantu dan menemani penulis berjuang bersama selama di bangku perkuliahan, yaitu Dhila, Usi, Hara, Dian, Tirsa, Dini, Victoria, Meysi, Vivi.
12. Kepada Kelas HI A & B Angkatan 2018, Eureka, terkhusus kelas B, atas segala bantuan dan kerjasamanya selama dibangku perkuliahan.



ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah kebijakan *Operation Green Fence* (OGF) Terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik di Cina. Cina sebagai negara impor sampah elektronik terbesar didunia mempengaruhi lingkungan hidupnya, oleh karena itu kebijakan OGF dikeluarkan untuk menegakkan kebijakan impor limbah Cina. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Telaah Pustaka. Dengan menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri, indikator yang digunakan adalah politik sebagai seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak dan negara yang berakar pada konsep “pilihan” yaitu memilih tindakan untuk membuat keputusan -keputusan dalam mencapai kepentingan nasional.

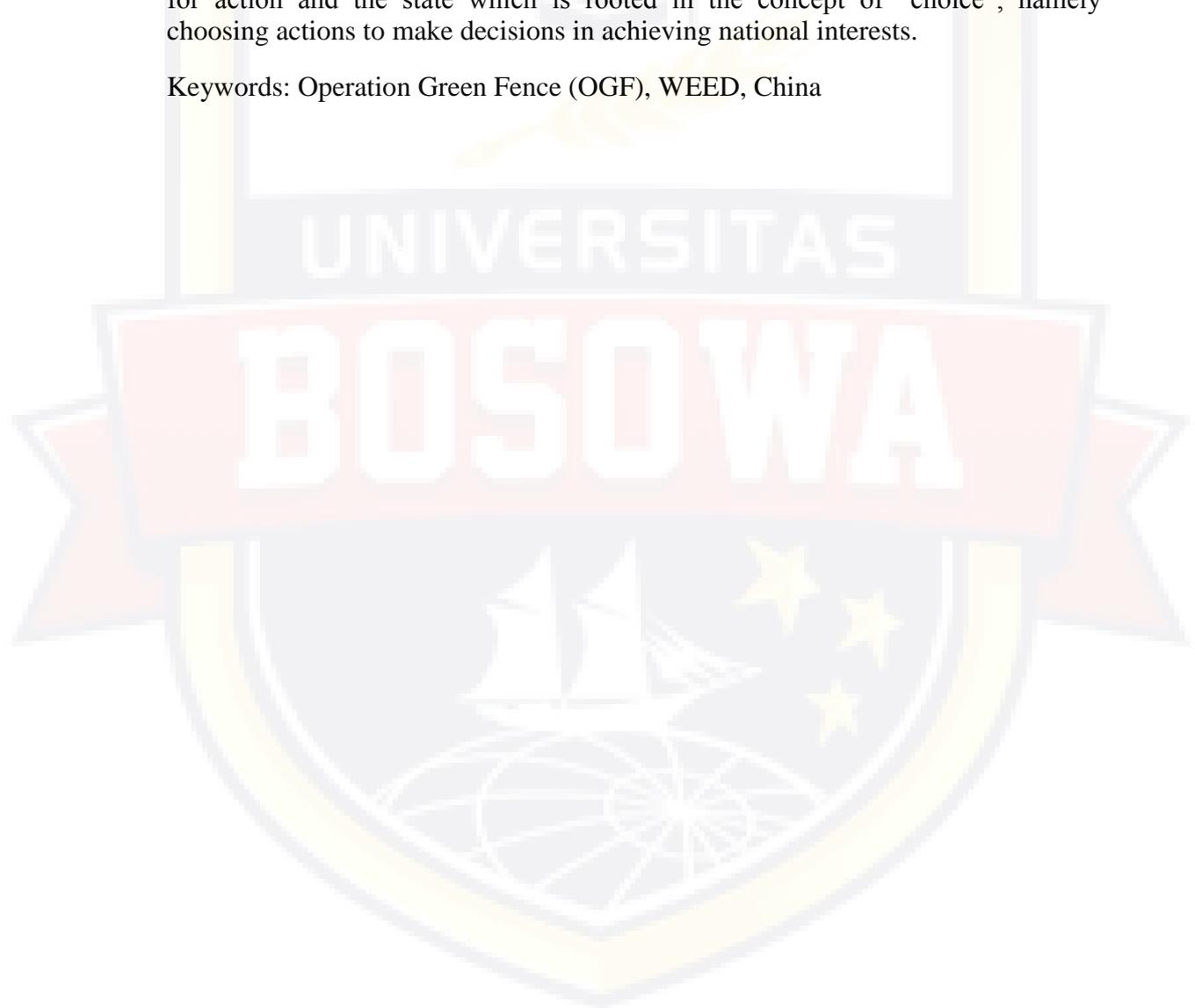
Kata kunci : *Operation Green Fance* (OGF), WEEE, negara Cina



ABSTRACT

This thesis aims to determine the policy steps of Operation Green Fence (OGF) against the Restrictions on the Import of Electronic Waste in China. China as the world's largest importing country for electronic waste affects its environment, therefore the OGF policy was issued to enforce China's waste import policy. The method used in writing this thesis is qualitative. The data collection technique used is Literature Review. By using the concept of Foreign Policy, the indicators used are politics as a set of decisions that serve as guidelines for action and the state which is rooted in the concept of "choice", namely choosing actions to make decisions in achieving national interests.

Keywords: Operation Green Fence (OGF), WEED, China

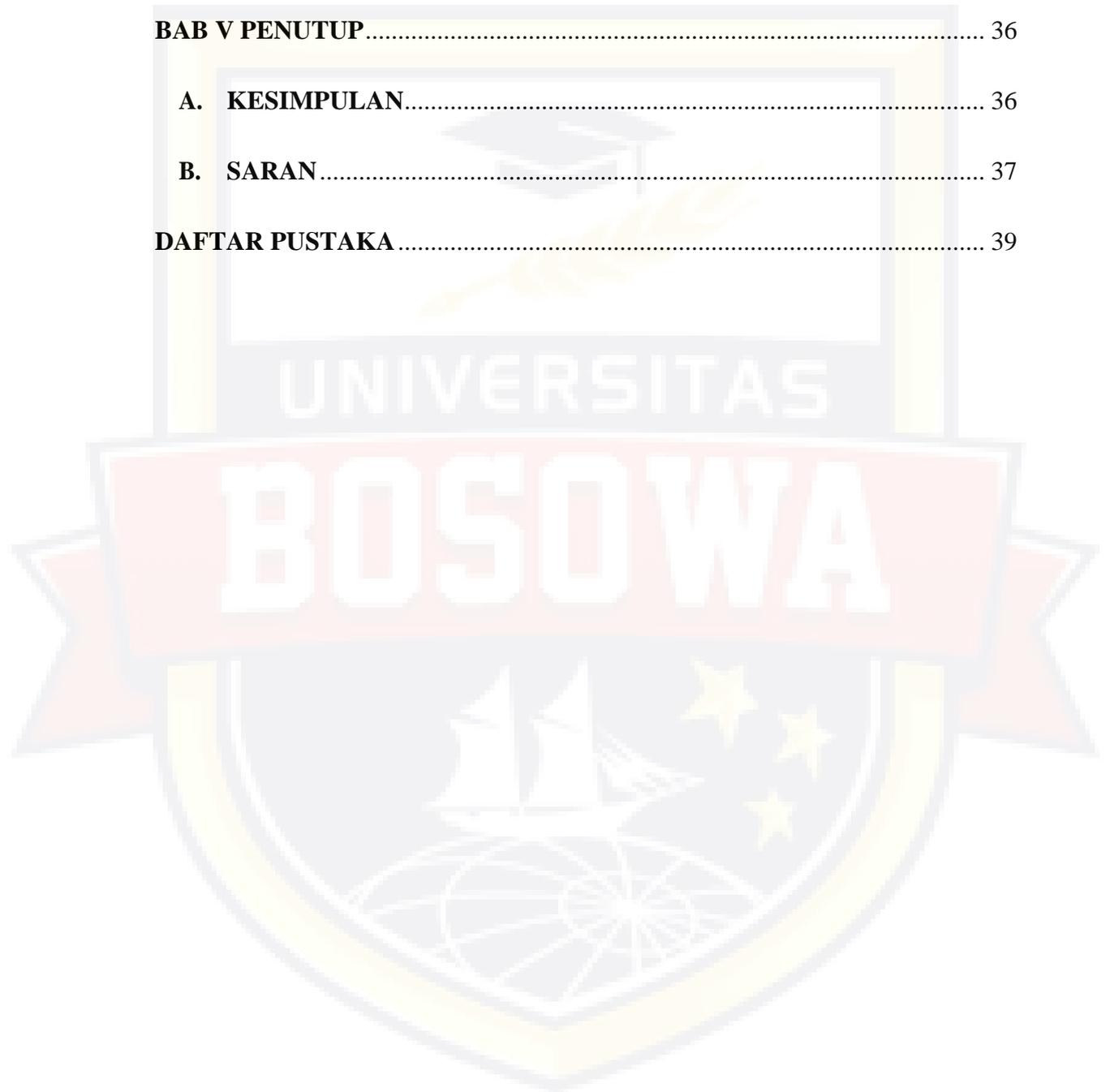


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	5
1. Batasan Masalah	5
2. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
a. Tujuan Penelitian	6
b. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9

a. Tipe Penelitian	9
b. Jenis Sumber Data	10
c. Teknik dan Pengumpulan Data	10
d. Teknik Analisis Data	10
F. Rancangan Sistematika Pembahasan.....	10
1. BAB I : Pendahuluan	11
2. BAB II : Tinjauan Pustaka	11
3. BAB III : Gambaran Umum	11
4. BAB IV : Analisa dan Pembahasan	11
5. BAB V : Penutup	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Kebijakan Luar Negeri.....	12
BAB III GAMBARAN UMUM.....	15
A. Fenomena Impor Sampah Elektronik (<i>E – Waste</i>) di Cina.....	15
B. Dinamika Permasalahan Sampah dan Pembatasan Larangan Impor Sampah Elektronik di Cina.	20
C. Kebijakan Operation Green Fence (OGF)	24
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Kebijakan Pemerintah Cina dalam Membatasi Pengiriman Sampah Elektronik.....	28

B. Langkah – Langkah Formal dan Informal untuk Membatasi Pengiriman Sampah Elektronik ke Cina	31
BAB V PENUTUP	36
A. KESIMPULAN.....	36
B. SARAN.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan, khususnya, telah menjadi topik utama dalam hubungan internasional selama tiga dekade terakhir. Hal ini disebabkan semakin memburuknya lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin disadarinya keseriusan masalah lingkungan yang dihadapi manusia. Terlebih lagi, isu lingkungan yang bersifat transnasional dan global membawa isu-isu tersebut ke ranah hubungan internasional (Porter & W., 1996). Salah satu isu lingkungan hidup yang sangat sering dibahas dalam hubungan internasional kontemporer adalah isu penanganan sampah, khususnya dalam hal ini sampah elektronik.

Selanjutnya, limbah sampah elektronik di Cina mengacu pada produk elektronik yang tidak lagi dapat digunakan dan oleh karena itu dibuang atau didaur ulang. Cina adalah importir dan produsen limbah elektronik terbesar di dunia dengan lebih dari 70% limbah elektronik global berakhir di tempat pembuangan sampah terbesar di dunia (Arora & Farge, 2020). Diperkirakan 60-80% dari limbah elektronik ini ditangani melalui proses daur ulang informal yang ilegal, tanpa tindakan pencegahan keselamatan yang diwajibkan secara hukum oleh peraturan pemerintah Cina (Walters, 2008). Pengolahan limbah elektronik dalam hal ini secara langsung menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan risiko kesehatan permanen di daerah sekitar lokasi pembuangan. Sementara pemerintah Cina dan komunitas internasional telah

mengambil tindakan untuk mengatur pengelolaan limbah elektronik, penegakan yang tidak efektif, celah legislatif, dan meluasnya daur ulang informal telah menjadi hambatan untuk mengurangi konsekuensi limbah elektronik (Kiddee, Naidu, & Wong, 2013).

Selain itu, berdasarkan Laporan *Global E-waste Monitor 2020* menemukan bahwa jumlah produksi limbah elektronik domestik tahunan di Cina saja mencapai sekitar 10,1 juta ton, sehingga melampaui AS sebagai negara penghasil limbah elektronik terbesar (Arora & Farge, 2020). Limbah elektronik dari komputer, ponsel, dan elektronik lainnya diperkirakan akan meningkat menjadi 27,22 juta ton pada tahun 2030, tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 10,4% sebagai aliran limbah dengan pertumbuhan tercepat di Cina (Asia, 2019).

Selain itu juga, keberadaan tempat pembuangan *e-waste* inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat di sekitar lokasi untuk menghasilkan uang dengan cara mendaur ulang atau mengolah kembali *e-waste*. Ada 2 jenis pendaur ulang, yaitu komunitas (pendaur ulang informal) dan perusahaan (pendaur ulang formal). Masyarakat akan memproses ulang elektronik untuk mengambil komponen yang masih berfungsi. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat komponen-komponen tersebut juga mengandung bahan-bahan yang bernilai ekonomis seperti aluminium, tembaga, emas, baja, platina, dan lain-lain, yang semuanya merupakan limbah elektronik yang ada (Frey, 2019).

Selanjutnya, sebagian besar sektor daur ulang informal Cina terbatas pada wilayah di sepanjang pantai tenggara Cina. Wilayah utama di mana *e-waste* dikirim adalah provinsi Guangdong, yang terletak di sepanjang pantai tenggara Cina. Dari sana *e-waste* menyebar ke daerah lain seperti Zhejiang, Shanghai, Tianjin, Hunan, Fujian dan Shandong untuk diproses. Operasi pembuangan limbah elektronik sering terjadi di daerah pinggiran kota, karena kurangnya penegakan dan pengendalian yang efektif (Chi X. S.-P., 2011).

Pemerintah Cina telah lama menyadari konsekuensi lingkungan dan kesehatan dari limbah elektronik, dan merupakan salah satu pendukung global pertama yang melarang ekspor limbah elektronik ke negara-negara berkembang. Kegagalan undang-undang Cina berasal dari kurangnya pengalaman tentang bagaimana mengelola limbah elektronik dan undang-undangnya yang ambigu dan kontradiktif secara keseluruhan. Impor sering kali berjalan di antara penyelundupan ilegal dan impor legal, karena otoritas peradilan yang menegakkan peraturan berjuang dengan ambiguitas dan kontradiksi dalam peraturan. Misalnya, impor limbah yang ditandai sebagai “tembaga atau aluminium daur ulang” akan menjadi impor legal berdasarkan Pemberitahuan Impor Limbah Kategori Ketujuh menciptakan celah bagi limbah elektronik untuk masuk secara legal ke Cina untuk bertahun-tahun (Jianxin Yang, 2008).

Meskipun undang-undang dan peraturan telah diterima oleh negara-negara maju terhadap ekspor ilegal limbah elektronik, tingginya jumlah pengiriman ilegal terus memperburuk masalah limbah elektronik di Cina.

Misalnya, anggota Uni Eropa setuju untuk tidak mengangkut limbah apa pun yang tunduk pada Konvensi Basel keluar dari Uni Eropa atau *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD) tetapi pengiriman ilegal masih meningkat di Cina dan negara berkembang lainnya (Gang Ni & Zeng, 2009). Salah satu insentif utama bagi mereka untuk mengekspor limbah elektronik adalah biaya pembuangan limbah elektronik domestik lebih tinggi daripada biaya ekspor. Selain itu, pialang limbah elektronik mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan dan dibayar dua kali : satu kali untuk memperoleh limbah elektronik, satu kali untuk pengiriman (Puckett, Byster, Westervelt, Sarah, & dkk, 2002).

Kemudian, di tahun 2018, Cina mulai menetapkan larangan impor 24 jenis sampah yang sebelumnya sudah diumumkan pada bulan Juli 2017. Hal ini menjadi perbincangan di dunia Internasional, dikarenakan bertahun-tahun sebelumnya China dikenal sebagai pengimpor sampah. Selain itu, hal ini juga dipandang sebagai kerugian dan tidak lagi menjanjikan keuntungan bagi Cina. Sampah impor tidak sepenuhnya dapat didaur ulang, dan pembuangan sampah yang tidak tepat serta kurangnya kontrol yang efektif telah menjadikan Cina sebagai pencemar lingkungan utama di dunia (Sebayang, 2018).

Selanjutnya, diketahui pula pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping kemudian membuat suatu kebijakan yang disebut sebagai *Operation Green Fence* (OGF), untuk upaya pemerintah Cina bersama dengan pihak bea cukai untuk lebih ketat dalam memeriksa kontainer-kontainer yang masuk ke wilayah Cina melalui pelabuhan yang isinya adalah limbah asing. Kemudian di tahun

2017, Pemerintah Cina pun membuat suatu rancangan kebijakan yang disebut sebagai *Operation National Sword* (ONS). Kebijakan ini menegaskan larangan masuknya limbah dari negara lain terhadap 24 kategori limbah padat yang mulai diberlakukan ditahun 2018. Cina juga memperbanyak jenis limbah tersebut menjadi 32 kategori. Kategori tersebut diantaranya merupakan plastik, kertas, tekstil, kayu, stainless steel, titanium, bagian mobil, termasuk perangkat keras seperti halnya peralatan elektrik dan elektronik (Setyani, 2020).

Berdasarkan kondisi lingkungan di Cina, penelitian ini berharap dapat melihat dan menganalisa mengenai Langkah-langkah Kebijakan Luar Negeri *Operation Green Fence* (OGF) terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik (*E – Waste*) di Cina.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batas waktu digunakan untuk menentukan waktu mulai dan berakhirnya penelitian. Sehingga penelitian ini bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh fakta penelitian. Dalam penelitian ini, batasan waktu yang digunakan penulis ialah kisaran waktu 2013 – 2021. Hal ini dikarenakan waktu tersebut merujuk pada gap masalah yang penulis paparkan pada latar belakang dan juga untuk menunjang aspek kebaruan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan Batasan Masalah diatas, rumusan masalah ialah sebagai berikut :

“Bagaimana Analisis Langkah-langkah Kebijakan Luar Negeri *Operation*

Green Fence (OGF) terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik (*E – Waste*) di Cina ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis Langkah-langkah Kebijakan Luar Negeri *Operation Green Fence* (OGF) terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik (*E – Waste*) di Cina.

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian memiliki kegunaan ialah sebagai berikut :

Kegunaan Akademis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis, juga melatih kemampuan penulis dalam menganalisa suatu masalah, dan menambah pengalaman meneliti penulis agar lebih cakap dalam menempuh pendidikan guna memenuhi syarat mengikuti Ujian Skripsi dan memperoleh gelar Strata 1 (S – 1) sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Kegunaan Praktis, tulisan penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan atau pandangan pembaca dan dapat menjadi bahan kepustakaan atau tumpuan penelitian mendatang untuk menjadi bahan perbandingan bagi penelitian sejenisnya.

Kegunaan Tambahan, karya ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat bagi dunia akademik dan memberikan kontribusi referensi atau literatur bagi pelajar

dan peneliti dalam studi Hubungan Internasional mengenai “ Analisis Langkah-langkah Kebijakan Luar Negeri *Operation Green Fence* (OGF) terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik (*E – Waste*) di Cina”.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah untuk menguji secara teoritis hubungan antar variabel, yaitu mengamati atau mengukur hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui penelitian yang mana akan dilakukan (Sugiyono, 2014) .Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep ini berarti ; pengertian, prakiraan mental, proses, pendapat (pemahaman), dan rancangan (ideal) dari suatu objek pemahaman dan pemikiran yang matang. Agar semua kegiatan berjalan secara sistematis dan lancar, diperlukan rencana yang mudah dipahami. Oleh karena itu, konsep yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan di atas adalah dengan menggunakan konsep yang berkaitan dengan fakta dan data yang ada, yaitu konsep kebijakan luar negeri atau *Foreign Policy*.

Tiap-tiap negara di dunia mempunyai impian dan tujuan yang harus dicapai. Pencapaian ini tercermin dalam politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri adalah kebijakan yang dirumuskan di dalam negeri dan dilaksanakan di luar negeri untuk memungkinkan suatu negara memajukan kepentingan nasionalnya (Evans & Newnham, 1998). Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikatakan Michael Mandelbaum. Kebijakan luar negeri dapat dilihat dari dua perspektif: memperluas kebutuhan domestik (*inside-out perspective*) atau

menanggapi dinamika internasional (*outside-in perspective*) (Mandelbaum, 1996).

Selain itu, Menurut Holsti, kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai alat politik yang digunakan oleh pemerintah negara-negara berdaulat dalam menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik internasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena menyangkut manfaat yang ingin dicapai dan tentang kondisi eksternal negara dalam sistem internasional (Holsti, 2012).

Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan usaha suatu negara untuk mengatasi dan mengambil keuntungan dari lingkungan eksternalnya melalui sikap dan tindakan yang berlaku (Perwita & Yani, 2011). Dalam pandangannya, kebijakan luar negeri merupakan fenomena yang sangat pervasif dan kompleks. kebutuhan lahir dan batin. Misalnya, aspirasi, karakteristik nasional, konflik, kapasitas, kegiatan yang bertujuan untuk mencapai identitas sosial, hukum, dan geografis suatu negara sebagai negara-bangsa. Bagi Rosenau, politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor utama: faktor eksternal (internasional), faktor struktural (dalam negeri) dan faktor kepemimpinan (individu). Model adaptasi Rosenau memiliki tiga variabel : perubahan eksternal, perubahan struktural (internal), dan kepemimpinan dengan indikator yang berbeda.

Di samping itu, menurut Umar Suryadi Bakry, politik luar negeri

diartikan sebagai kebijakan, rancangan, komitmen, dan taktik yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan kepentingan suatu negara diluar yurisdiksinya (Bakry, 2017).

Oleh karena itu, dalam merangkum definisi dari beberapa pendapat yang telah disebutkan sebelumnya, dan mendeskripsikan *foreign policy* (selanjutnya diterjemahkan sebagai kebijakan luar negeri) sebagai seperangkat pedoman, visi, serta landasan dalam pencapaian tujuan nasional suatu negara, yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai tindakan maupun upaya-upaya yang dilakukan oleh negara tersebut di luar wilayah yurisdiksinya. Berdasarkan batasan tersebut, pembahasan dalam penelitian ini akan diarahkan pada kebijakan luar negeri Cina sebagai sebuah negara berdaulat terhadap pembatasan impor sampah, khususnya sampah elektronik (e-waste) serta analisis langkah-langkah kebijakan tersebut terhadap lingkungan hidup di Cina.

E. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang mana bertujuan menggambarkan kejadian yang diteliti seobjektif mungkin berlandaskan penglihatan atau perspektif peneliti, serta memberikan pandangan sebab akibat antara dua variabel yang sedang penulis pelajari. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan temuan dan analisis terkait bagaimana langkah-langkah kebijakan luar negeri *Operation Green Fence* (OGF)

terhadap pembatasan impor *e-waste* China.

b. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang mana, berhubungan dengan fokus penelitian dan diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada. Sumber data yang dimaksud ialah berupa telaah pustaka, buku, terbitan jurnal, website lembaga pemerintahan, serta organisasi internasional terkait dengan topik penelitian.

c. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik Studi Pustaka (*Library Research*) dalam mengumpulkan data adalah teknik yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini. Dengan teknik ini penulis memperoleh bahan dan data yang sehubungan dengan topik penelitian dengan cara menelusuri berbagai sumber literatur, buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah, majalah dan terbitan berkala yang dirasa berkaitan.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mana data yang penulis dapatkan tidak berbentuk numerik atau data – data non matematis yang relevan dengan penelitian ini, yakni menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis temukan melalui telaah pustaka. Kemudian penulis berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Rencana sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab pertama, yaitu terdapat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan rencana sistematika pembahasan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua, yaitu berisikan tinjauan pustaka yang berisikan penelusuran kepustakaan dan literatur mengenai konsep *foreign policy*.

3. BAB III : Gambaran Umum

Bab ketiga, yaitu berisikan gambaran umum tentang objek penelitian dimana bab ini akan membahas dinamika permasalahan pembatasan dan permasalahan impor sampah elektronik (*e-waste*) di cina.

4. BAB IV : Analisa dan Pembahasan

Bab keempat, yaitu pembahasan terkait hasil penelitian yang berisi Analisis Kebijakan Luar Negeri Cina *Operation Green Fence* (OGF) terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik (E – Waste) dari 2013 - 2021.

5. BAB V : Penutup

Bab kelima, yaitu berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis dari bab sebelumnya dan menjadi saran mengenai objek penelitian serta penstudi Hubungan Internasional dalam melakukan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Masing-masing negara di dunia memiliki cita-cita dan tujuan yang harus terpenuhi. Pencapaian ini tercermin dalam politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri merupakan kebijakan yang dirumuskan di dalam negeri kemudian dilaksanakan di luar negeri untuk memungkinkan salah satu negara memajukan kepentingan nasionalnya (Evans & Newnham, 1998). Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikatakan Michael Mandelbaum. Kebijakan luar negeri dapat dilihat dari dua perspektif: memperluas kebutuhan domestik (inside-out perspective) atau menanggapi dinamika internasional (outside-in perspective) (Mandelbaum, 1996).

Selain itu, menurut KJ. Menurut Holsti, kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai alat politik yang digunakan oleh pemerintah negara-negara berdaulat dalam menjalani hubungan dengan aktor-aktor lainnya dalam politik internasional guna mencapai tujuan nasional. Karena menyangkut manfaat yang ingin dicapai dan tentang kondisi eksternal negara dalam sistem internasional (Holsti, 2012).

Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan upaya dari negara untuk mengatasi dan mengambil keuntungan dari lingkungan diluar negaranya melalui sikap dan tindakan yang berlaku (Perwita & Yani, 2011). Dalam pandangannya, kebijakan luar negeri merupakan keadaan yang

sangat kompleks. kebutuhan lahir dan batin. Misalnya, aspirasi, karakteristik nasional, konflik, kapasitas, kegiatan yang bertujuan untuk mencapai identitas sosial, hukum, dan geografis suatu negara sebagai negara-bangsa. Bagi Rosenau, politik luar negeri dipengaruhi oleh tiga faktor utama: faktor eksternal (internasional), faktor struktural (dalam negeri) dan faktor kepemimpinan (individu). Model adaptasi Rosenau memiliki tiga variabel : perubahan eksternal, perubahan struktural (internal), dan kepemimpinan dengan indikator yang berbeda.

Selain itu pula, tujuan kebijakan luar negeri secara umum dipahami sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain. Hampir tidak ada kesepakatan bersama tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan kebijakan luar negeri dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Selain itu, tujuan kebijakan luar negeri juga berkembang dan berbeda dari satu negara ke negara lain. Namun menurut Padelford dan Lincoln, kebijakan luar negeri memiliki beberapa sifat mendasar yang ingin berusaha dicapai oleh semua negara-negara yaitu: Pertama, Keamanan nasional, kedua Kemajuan ekonomi, ketiga Meningkatkan kekuatan nasional, dan yang keempat Prestise internasional (Padelford & Lincoln, 1962).

Di samping itu, menurut Umar Suryadi Bakry, politik luar negeri diartikan sebagai kebijakan, strategi, komitmen, dan taktik yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan suatu negara di luar yurisdiksinya) (Bakry, 2017).

Oleh sebab itu, dalam merangkum definisi dari beberapa pendapat yang sudah disebutkan diatas, dan mendeskripsikan *foreign policy* (selanjutnya diterjemahkan sebagai kebijakan luar negeri) sebagai suatu pedoman, visi, dan wadah bagi suatu negara untuk pencapaian tujuan nasionalnya, yang selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai tindakan serta usaha-usaha yang dibuat oleh negara tersebut diluar wilayah kekuasaannya. Dari batasan tersebut, yang dibahas dalam penelitian ini akan ditunjukan pada kebijakan luar negeri Cina sebagai negara yang berdaulat akan pembatasan impor sampah, khususnya sampah elektronik (e-waste) serta analisis dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap lingkungan hidup di Cina.

BOSOWA



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Fenomena Impor Sampah Elektronik (*E – Waste*) di Cina

Sampah elektronik (E-Waste/WEEE) merupakan sebuah fenomena menarik yang ada di Cina. E-waste atau WEE, yang secara resmi disebut *Waste Electricity and Electronic Waste Equipment* (WEE), telah menarik banyak perhatian di Cina dan di seluruh dunia. Sebagai aliran limbah yang tumbuh paling cepat di dunia, peralatan limbah merupakan sumber penting bahan baku sekunder, bahan sumber daya seperti tembaga dan logam mulia (Hao, Wang, Wu, & Guo, 2020). Selain itu, fenomena ini juga menarik, dikarenakan seiring berkembangnya teknologi dunia, begitu pula peradaban manusia, tentu saja, tetapi sebenarnya ada sisi lain darinya.

Pertumbuhan ekonomi Cina merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sejak Deng Xiaoping mengeluarkan kebijakan "*open door*" pada tahun 1979, pertumbuhan ekonomi China telah lebih cepat dari sebelumnya. Hal ini mendorong perkembangan sektor industri Cina, terutama sektor elektronik seperti televisi, lemari es, komputer dan telepon genggam. Sejak produksi elektronik Cina bergabung dengan *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001, produksi elektronik Cina bertujuan tidak hanya untuk memenuhi permintaan dalam negeri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor luar negeri (Martin Eugster, 2008). Negara tujuan ekspor peralatan elektronik antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa.

Meskipun sampah elektronik juga merupakan komoditas Cina dengan nilai ekonomi bagi banyak pihak. Pasalnya, fenomena sampah elektronik yang dikirim ke Cina dari negara lain menguntungkan pihak yang melakukan proses daur ulang, seperti pelaku daur ulang. Proses pembongkaran dan daur ulang dilakukan untuk mendapatkan kembali komponen sampah elektronik yang dapat digunakan untuk dijual kembali. Namun, terlepas dari manfaat ekonomi yang dicapai, ada harga yang harus dibayar karena akumulasi dampak dari sampah elektronik. Kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan merupakan risiko jangka panjang yang harus ditangani. Memastikan kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan dari bahaya adalah kewajiban yang perlu mendapat perhatian nasional (Eugster, 2008).

Produksi peralatan elektronik yang semakin meningkat dan juga banyaknya impor barang elektronik yang dipasarkan di Cina menyebabkan semakin beragam pula peralatan elektronik yang dipasarkan di China. Semakin banyaknya barang elektronik yang ada di masyarakat mengakibatkan semakin singkatnya penggunaan suatu produk elektronik. Dengan demikian barang elektronik yang lama maupun rusak semakin menumpuk dan menjadi sampah. Hal ini juga dikatakan oleh Gopal Krishna bahwa, "*waste is now electronic*", Krishna mendeskripsikan hal tersebut ketika melihat bahwa terjadi peningkatan jumlah atas peralatan elektronik yang usang menuju ke tempat pembuangan (Gabrys, 2013).

Di samping itu, sumber utama limbah elektronik yang diproses di Cina adalah rumah tangga, institusi domestik seperti sekolah dan rumah sakit,

instansi pemerintah dan bisnis, dan produsen peralatan. Limbah elektronik ini biasanya disalurkan melalui : pasar barang bekas di mana perangkat yang dapat digunakan kembali dapat dijual kembali dengan harga yang wajar, sistem donasi (ilegal) yang mengirimkan peralatan rumah tangga bekas ke daerah pedesaan yang lebih miskin di Tiongkok barat, atau melalui pedagang keliling yang menjual kembali limbah elektronik ke dealer. Saluran ketiga adalah bentuk paling umum dari pengelolaan limbah elektronik di Cina, yang menciptakan sektor informal yang masif (Lu, Zhang, Zhong, & dkk, 2015).

Selain itu, kontributor utama masalah limbah elektronik di Cina adalah bahwa sebagian besar limbah elektronik yang dibuang di Cina - laporan bervariasi antara 60% dan 80% - ditangani melalui proses daur ulang informal yang ilegal (Wang, Qian, & Liu, 2020). Tidak seperti metode formal Cina, daur ulang limbah elektronik informal sangat tidak diatur dan tidak aman, tetap menjadi pasar yang menguntungkan karena tenaga kerja yang murah dan permintaan yang tinggi untuk pembuangan barang elektronik (Yu, Williams, Ju, & Shao, 2010).

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020, industri daur ulang limbah elektronik formal Cina cukup berkembang, mengikuti peraturan yang ketat, insentif pemerintah, dan pengembangan dan perluasan fasilitas daur ulang (Rene, Seturajan, Kumar Ponnusamy, & dkk, 2021). Proses daur ulang formal mempraktekkan metode penanganan limbah yang aman dan memungkinkan pemulihan bahan baku berharga, yang nantinya dapat digunakan kembali di manufaktur lain. Proses daur ulang limbah elektronik

biasanya terdiri dari langkah-langkah berikut : pengumpulan, penyimpanan, pemilahan/pembongkaran/penghancuran, pemisahan, dan pemulihan (RTS.COM, 2021). Limbah elektronik dikumpulkan dari perusahaan atau produsen dan disimpan dengan aman di fasilitas daur ulang sampai limbah tersebut dibongkar secara manual dan disortir ke dalam kategori apa yang harus dibuang dan apa yang harus dipulihkan. Bagian elektronik yang lebih kecil selanjutnya dipisahkan menjadi bahan spesifiknya menggunakan air dan magnet, dan akhirnya, komponen yang diinginkan dapat dipulihkan dan dipulihkan untuk penggunaan di masa mendatang. Terlepas dari ketelitian proses daur ulang formal ini, dilaporkan hanya sekitar 40% efisien (Powell D., 2013).

Berbagai undang-undang dan program lingkungan telah dikeluarkan oleh pemerintah Cina untuk mengatur sektor produksi produk elektronik dan pengelolaan limbah elektronik (Yu, Williams, Ju, & Shao, 2010). Salah satunya, pada tahun 2012, Cina mengadopsi sistem tanggung produsen yang kemudian diperluas (*extended producer responsibility*/EPR) dari UE, yang meminta produsen bertanggung jawab atas pengumpulan dan daur ulang elektronik. Atau dikenal sebagai "*Producer Takeback*", sistem manajemen EPR mengharuskan produsen untuk melakukan pengelolaan produk mereka yang aman bagi lingkungan bahkan setelah dibuang. Ukuran Retribusi Pajak dan Penggunaan untuk Daur Ulang E-limbah diterapkan pada produsen untuk secara resmi memberlakukan sistem EPR (Cao, Lu, Chen, Zhang, Xuemei, & dkk, 2016).

Selain itu, daur ulang limbah elektronik informal di Cina begitu lazim sehingga membuat program regulasi menjadi kurang efektif. Proyek percontohan peraturan biasanya gagal mengumpulkan limbah elektronik yang memadai karena tidak memberi insentif kepada konsumen untuk membuang barang elektronik yang sudah habis masa pakainya dengan aman. Meskipun banyak konsumen Cina menyadari bahwa penting untuk mendaur ulang limbah elektronik dengan aman, mereka masih menghargai nilai uang dari produk mereka dan memilih daur ulang informal sebagai gantinya (Yu, Williams, Ju, & Shao, 2010). Sebanyak 90% konsumen enggan membayar daur ulang limbah elektronik karena masih ada nilai uang di akhir masa pakai produk. Sementara perangkat elektronik dan limbah dikumpulkan di berbagai wilayah Tiongkok dan menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan di wilayah tersebut, banyak aktivis berpendapat bahwa distributor dan negara sumber tidak dianggap bertanggung jawab secara signifikan (Liu, Tanaka, & Matsui, 2006). Sementara peraturan internasional telah meningkatkan program daur ulang domestik di negara-negara sumber ini (seperti Amerika Serikat), pengiriman Limbah Elektronik belum sepenuhnya diberantas dan tetap menjadi masalah global yang signifikan (epa.gov, 2014).

Selain itu, Cina memanfaatkan limbah plastik untuk listrik dengan alat bernama insinerator, sampah-sampah akan dibakar ke dalam alat tersebut dan dari pembakaran itu tidak menghasilkan emisi karbon yang berlebihan (SCHMITZ, 2017). Di distrik Chaoyang Beijing terdapat 178 insinerator yang mampu menghasilkan listrik untuk 140.000 rumah. Ini merupakan salah

satu hal yang menyebabkan adanya permintaan plastik daur ulang yang tinggi dari produsen dan pabrik Cina. Selain itu, kelangkaan bahan baku plastik adalah hal lain yang menyebabkan permintaan limbah (Peng, 2017). Dapat dilihat dari adanya pergeseran produksi plastik dari barat ke Asia yaitu sebesar 24 % produksi plastik dunia terdapat di Cina. Selain itu, apabila menggunakan sampah dalam negeri sendiri tidak memiliki kualitas sebaik sampah- sampah dari negara maju (SCHMITZ, 2017). Oleh karena itu, selama ini pemerintah melakukan impor sampah dari negara lain.

B. Dinamika Permasalahan Sampah dan Pembatasan Larangan Impor Sampah Elektronik di Cina.

Seperti yang diketahui, bahwa Limbah elektronik (WEEE) di Cina berasal dari dua sumber, yaitu sumber domestik dan pengiriman dari negara lain. Sumber dalam negeri adalah sumber yang dibuat di Cina, yaitu baik dari produksi maupun fabrikasi barang elektronik yang dibuat di Cina dan kemudian digunakan oleh diaspora Cina itu sendiri. Sedangkan sumber kedua, yaitu hasil pengiriman dari negara lain, adalah pengiriman WEEE dari negara lain, baik legal maupun selundupan (ilegal). Sumber WEEE nasional berasal dari manufaktur di Cina. Cina mulai dilihat sebagai pemain penting dalam industri elektronik. Selain itu, Cina juga merupakan negara yang menyumbangkan sebagian besar produksi barang elektronik dibandingkan total penjualan di dunia. Produk elektronik buatan China dijual ke banyak negara di dunia. Selanjutnya, secara total, diperkirakan hampir 50 juta ton *e-waste* dihasilkan pada 2018 dengan Cina memimpin dengan 7,2 juta ton per

tahun, sedangkan Amerika Serikat (6,3), Jepang Jepang (2,1), India (2.0) dan Jerman (1.9) tertinggal (Online, 2018).

Selain itu, Sumber WEEE juga berasal dari hasil pengangkutan sampah dari negara lain ke China tersebut merupakan penyumbang terbesar jumlah WEEE di China. Negara-negara yang secara teratur mengirim WEEE ke China antara lain Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Selain berasal dari ketiga negara tersebut, ada negara lain yang mengirimkan WEEE ke China, namun yang paling banyak mengirimkan WEEE dan dalam jumlah besar ke China adalah ketiganya. Limbah elektronik atau WEEE yang masuk ke China sebagian besar disebabkan oleh pengiriman lintas batas dari negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Negara pengirim seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang lebih memilih untuk mengirim WEEE dan perangkat elektronik bekas ke negara lain untuk didaur ulang daripada harus melalui proses daur ulang di wilayah mereka. Karena pengiriman ke negara lain, seperti China yang memiliki populasi sangat besar, pasti akan mempengaruhi biaya proses daur ulang. Hal ini dikarenakan proses daur ulang yang dilakukan di China dilakukan secara manual, dilakukan langsung oleh warga sekitar tempat penampungan WEEE. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk pembongkaran dan daur ulang dapat diabaikan dibandingkan dengan menerapkan proses daur ulang standar yang baik di negara mereka, sehingga manfaatnya akan jauh lebih tinggi (Lundgren, 2012).

Selanjutnya, sampah elektronik yang dikirim ke negara lain seringkali

dilakukan secara ilegal. Hal ini karena masih legal untuk mengirimkan barang elektronik bekas yang masih bisa digunakan di negara lain. Sedangkan pengiriman barang elektronik rusak yang sudah menjadi limbah atau WEEE tergolong ilegal. Namun, transfer WEEE lintas batas masih terjadi karena daur ulang WEEE mahal untuk memenuhi standar sosial dan lingkungan, seperti yang terjadi di UE, AS, dan Jepang. . WEEE adalah barang elektronik yang digunakan untuk memanipulasi otoritas pabean negara tujuan. Begitu juga di China, pengiriman WEEE seringkali dilakukan secara ilegal. Pengiriman gelap berbasis keinginan dapat mengurangi biaya daur ulang sebanyak mungkin bagi pengirim WEEE dan permintaan dari pengumpul yang ingin mendapatkan suku cadang atau komponen WEEE yang masih dapat digunakan dengan harga murah. Saat pengiriman dilakukan dengan memberi label WEEE sebagai barang elektronik bekas yang dapat digunakan, atau dengan mencampurkan WEEE dengan barang elektronik bekas. Pada dasarnya, China telah melarang berbagai bentuk impor WEEE yang berlaku sejak 15 Agustus 2002. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk keseriusan China dalam meratifikasinya *Basel Convention, Basel Convention on the Movement of Hazardous Wastes Across National Borders* dan Penanganannya (Gerakan Lintas Batas Limbah B3 dan Pembuangannya) pada tahun 2001.

Selain itu, terdapat pula penelitian di China telah menunjukkan bahwa teknik daur ulang yang sangat sederhana bersama dengan sejumlah besar e-waste yang telah mengalami daur ulang menyebabkan kerusakan

lingkungan, tanah dan air juga terkontaminasi senyawa kimia (manusia) yang ada di Guiyu, yang disebabkan oleh pembakaran plastik dan papan sirkuit yang mengandung penghambat api, larutan kimia untuk mengekstraksi emas, platinum, tembaga, dan logam lainnya. Sungai Lijiang yang mengalir melalui Guiyu menduduki peringkat sebagai sungai paling tercemar di provinsi Guangdong selatan, Cina, karena ada berbagai zat beracun yang ada di air sungai, seperti tembaga, nikel, kadmium tinggi, timbal, merkuri dan arsenik (dbs.com, 2019).

Adanya pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan telah menimbulkan keberatan dari berbagai organisasi lingkungan. Pada tahun 2005, menurut *China's State Environmental Protection Administration* (SEPA), sekitar 50.000 protes dan keluhan tentang polusi terjadi. dampak lingkungan karena adanya e-waste (Go, Suzuki, & Xiaoxia, 2008). Selama protes, aktivis Greenpeace mengirim kartu pos dengan e-waste yang mereka temukan di Guiyu. Greenpeace adalah salah satu LSM internasional yang paling berani dan terbuka untuk mengungkapkan tujuan mereka kampanye terkait dengan masalah WEEE di Cina. Hal ini terlihat dari upaya Greenpeace untuk memimpin protes dan kampanye terkait isu WEEE yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Bahkan Greenpeace di China telah menjadi isu di WEEE sebagai salah satu dari lima isu yang diperjuangkan di China. Dengan dukungan Greenpeace Internasional, upaya Greenpeace China seringkali menarik perhatian media massa sehingga dapat memperluas jangkauan berita baik di dalam maupun

luar negeri (Walters, 2008).

C. Kebijakan Operation Green Fence (OGF)

Sehubungan dengan permasalahan yang timbul akibat permasalahan ekspor dan impor sampah elektronik ini, maka pemerintah Cina mengeluarkan sebuah aturan Kebijakan *Operation Green Fence* (OGF) diperkenalkan kembali pada Februari 2013 untuk membantu membendung aliran limbah berkualitas buruk yang terkontaminasi dari AS dan Eropa. Permintaan Cina untuk bahan baku daur ulang berbiaya rendah untuk bahan bakar industri manufaktur kolosalnya, sampai saat itu, memicu perdagangan global yang berkembang.

Peraturan Cina telah lama melarang tingkat kontaminasi yang berlebihan dalam impor barang daur ulang, tetapi ini jarang ditegakkan. Dengan memaksa perusahaan asing untuk meningkatkan kualitas limbah yang mereka jual ke Cina, pemerintah Cina bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ratusan perusahaan Cina skala kecil yang mendaur ulang sampah yang terkontaminasi menggunakan teknik yang tidak sehat yang mencemari saluran air negara dan merusak kualitas udara.

Inisiatif "*Green Fence*" sepuluh bulan, yang akan berakhir pada November 2013, telah menetapkan batas 1,5% kontaminasi yang "diizinkan" di setiap balai barang daur ulang yang diimpor. Ini termasuk inspeksi acak dari semua bentuk limbah, termasuk logam, plastik, tekstil, karet, elektronik dan bahan kertas yang dipulihkan (MBAPOLYMERS.COM, 2013).

Kebijakan perdagangan limbah Cina melarang semua impor limbah berbahaya, bahkan untuk tujuan ekspor. Akibatnya, tidak ada impor limbah berbahaya Cina yang diamati dalam data. Setiap impor limbah yang akan diklasifikasikan sebagai berbahaya secara otomatis ditolak. Perjanjian internasional utama yang mengatur pergerakan limbah berbahaya lintas negara adalah Konvensi Basel, yang mulai berlaku pada tahun 1992. Konvensi tersebut mensyaratkan, antara lain, bahwa negara-negara dapat melarang impor limbah berbahaya dan bahwa eksportir limbah menghormati larangan yang diberlakukan oleh importir limbah.

Oleh karena itu, di bawah Konvensi Basel, Cina diizinkan untuk melarang impor limbah berbahaya dan eksportir limbah terikat untuk menghormati larangan China. OGF dilakukan untuk menegakkan kebijakan impor limbah China. Di sisi lain, perdagangan global limbah tidak berbahaya sebagian besar berada di luar cakupan Konvensi Basel. Perdagangan limbah tidak berbahaya mengikuti aturan yang mengatur perdagangan barang, misalnya Organisasi Perdagangan Dunia (Balkevicius, Sanctuary, & Zvirblyte, 2019).

Selanjutnya juga, *Operation Green Fence Operation* (OGF), Operasi ini tidak membuat peraturan baru melainkan menegakkan peraturan yang dibuat pemerintah Cina melalui berbagai kementerian yang bersangkutan pada tahun 2011. Seperti yang dicantumkan pada pasal 12, yaitu :

“ In the process of importing solid waste, measures shall be taken to prevent it [imports] from spread[ing] seepage and leakage or other measures to

prevent pollution of [the] environment.”

Bahwa pemerintah Cina menemukan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam impor limbah padat dengan menunjukkan foto sampah, sisa makanan dan bahan dibawah standar yang telah ditentukan yang sengaja dikirim ke Cina (Flower, 2016). Operasi ini sangat mempengaruhi pasar ekspor karena menyebabkan negara-negara yang melakukan ekspor ke Cina kebingungan kemana membuang limbah daur ulangnya, terutama untuk kertas dan plastik daur ulang. Cina dalam operasi ini melakukan inspeksi oleh bea cukai untuk membatasi jumlah bahan yang tidak dapat di daur ulang.

Diketahui juga bahwa beberapa eksportir besar, seperti Amerika telah meningkatkan inspeksi peti kemas mereka di sini di AS, sebelum peti kemas dikirim ke pelabuhan untuk pengiriman. *Resource Recycling* telah memperoleh “*Supplier Letter of Awareness*” dari ACN, pengeksportir kertas daur ulang terbesar dari AS, yang merinci banyak “item yang menjadi perhatian” termasuk:

1. Tidak ada toleransi untuk barang-barang terlarang, seperti e-scrap, tekstil, limbah hijau, kotoran hewan/manusia, serangga, hewan, sisa makanan, limbah medis, dll.
2. Tingkat larangan harus dipertahankan di bawah 1,5 persen berdasarkan bale-by-bale. Contoh umum termasuk kayu, logam, kaca dan plastik.
3. Bahan yang dikirim sebagai “kertas bekas” tetapi salah dinyatakan sebagai penyebab penalti bea cukai, termasuk pengiriman barang-barang yang

dapat diubah seperti gulungan, gulungan, kertas berkotak atau terbungkus plastik, lembaran yang dipotong, dll. Baling kawat adalah satu-satunya bentuk kemasan yang dapat diterima untuk “limbah kertas.”

4. Bahan basah (melebihi 12 persen standar "kering udara") menciptakan lingkungan untuk degradasi di mana bahan dapat mengambil kotoran, mengundang pengawasan tambahan, terlepas dari tingkat penghalang.
5. Memuat foto untuk setiap kontainer harus dikirim pada atau sebelum tanggal batas akhir untuk setiap pemesanan, sehingga dapat ditinjau pada waktu yang tepat. Pengiriman akan ditangguhkan dan berpotensi dikembalikan jika gagal melakukannya.
6. Pastikan setiap wadah bersih dari benda asing/kotoran sebelum memuat (barang-barang seperti untuk pemblokiran/penguat dan barang-barang seperti paket gel penyerap kelembaban yang ditinggalkan oleh pengirim sebelumnya) (Powell J. , 2020).

Proses perumusan kebijakan luar negeri Cina untuk melarang impor limbah padat dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 2017 ketika pemerintah China mengumumkan tindakan “*National Sword*”. *National Sword* adalah upaya untuk menghentikan penyelundupan, karena kelompok tertentu menggunakan izin ilegal untuk mengimpor limbah padat. Penanggulangannya adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap bal plastik berkualitas rendah dan kertas dengan kadar air tinggi. Pemeriksaan dilakukan oleh Administrasi Umum Bea Cukai Cina terhadap sampah asing seperti plastik, limbah industri, perangkat elektronik, dan

limbah rumah tangga lainnya. Sebuah inspeksi dilakukan di sebuah pabrik di Guangdong, China pada pertengahan Juni. Bea Cukai Shantou, Kementerian Perlindungan Lingkungan, Inspeksi dan Karantina menyita 85.000 ton plastik dan besi tua senilai RMB 1 miliar (US\$146,5 juta). Pada 18 Juli 2017, China memberi tahu WTO bahwa mereka akan membatasi impor jenis plastik tertentu seperti PET, PE, PVC, PS, tekstil, dan terak vanadium hingga akhir tahun. Akhirnya, pembatasan impor diberlakukan pada awal 2018 (Octaviana, 2018).

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memberikan penjelasan terkait apa pengaruh Kebijakan Luar Negeri *Operation Green Fence* (OGF) terhadap Pembatasan Impor Sampah Elektronik (*E – Waste*) di Cina dalam kurun waktu 2013 - 2021.

A. Kebijakan Pemerintah Cina dalam Membatasi Pengiriman Sampah Elektronik

Dalam hal menindak lanjuti hal – hal yang ditimbulkan akibat proses

pengiriman sampah di Cina, khususnya lingkungan hidup di Cina, maka pemerintah Cina mengeluarkan Kebijakan Luar Negerinya berupa *Operation Green Fence* (OGF) dan mulai diperkenalkan di tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping dalam usaha pemerintah Cina memeperketat memeriksa isi dari kontainer-kontainer impor yang masuk ke negaranya lewat pelabuhan yang berisikan limbah asing bersama pihak bea cukai.

Kemudian, pada pertengahan 2017, pemerintah Cina mengumumkan kebijakan pelarangan impor 24 jenis sampah. Karena sifat kebijakan Cina, cukup untuk mengimpor barang bekas, dan pada akhir 2017 pemerintah Cina mengatakan kepada WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) bahwa Cina tidak lagi mengimpor sebagian besar plastik, kertas, tekstil, dan produk daur ulang lainnya. Pemerintah Cina telah mengeluarkan arahan pelarangan impor sampah, dan masyarakat serta penduduk Cina menyambut baik keputusan tersebut. Di sisi lain, sebagian besar orang Cina terkejut bahwa Cina telah mengimpor sampah secara legal selama bertahun-tahun (Minter, 2017).

Larangan ini juga tidak hanya mengubah rantai pasokan limbah padat daur ulang global, yang mengalihkan limbah padat ke pasar lain, seperti Malaysia dan bagian lain di Asia Tenggara (Tran & Matsuda, 2021); tetapi juga mengarah pada pembangunan infrastruktur baru untuk pengelolaan limbah padat di negara-negara tujuan baru ini guna menyediakan kapasitas untuk menangani pertumbuhan aliran limbah yang tiba-tiba. Selain itu, hal ini juga meningkatkan aliran limbah yang berpotensi berbahaya, misalnya *Waste Electrical and Electronic Equipment* (WEEE) ke Thailand yang mendaur

ulang limbah tersebut menjadi bahan plastik baru (Hook & Reed, 2018). Akibatnya, Malaysia, Vietnam, dan Thailand akan membekukan impor limbah padat, yang akan menyebabkan produsen limbah utama seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Australia menghadapi tantangan untuk membangun mekanisme alternatif untuk menangani limbah padat (Review, 2018).

Selain itu, salah satu alasan utama larangan impor limbah adalah pencemaran lingkungan yang serius dan masalah kesehatan manusia terkait yang berasal dari penanganan impor Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik (WEEE). Misalnya, sebelum pelarangan, 70% WEEE di seluruh dunia diimpor oleh Cina melalui berbagai jalur. Guiyu Guangdong di pantai tenggara Cina adalah situs terbesar untuk menangani limbah listrik di China, dengan lebih dari 20 tahun sejarah daur ulang limbah listrik. Ada kurang dari 200 perusahaan yang disetujui untuk daur ulang limbah elektronik, yang berarti tidak mungkin menangani volume limbah yang sangat besar di pasar (Song, McLellan, Liu, & et.al, 2021).

Selain itu juga, terdapat pula kebijakan pemerintah Cina yang dinamai *The Operation National Sword* yaitu inisiatif kebijakan yang diluncurkan pada tahun 2017 untuk memantau dan meninjau secara lebih ketat impor sampah daur ulang. (Harper, 2018) Pemerintah Cina menerapkan *Green Fence Operation* pada Februari 2013. Inisiatif ini mendahului *The Operation National Sword*, seperti yang sudah-sudah diluncurkan sebagai upaya inspeksi agresif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dapat

didaur ulang dan terkontaminasi yang dikirim ke negara tersebut (Berman, 2019).

Kemudian, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Cina telah mengumumkan bahwa baja bekas, limbah plastik pasca-industri, botol PET dan impor limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE) akan dilarang pada akhir tahun. Sebuah pernyataan dari kementerian mencantumkan 32 kelas bahan yang akan dipindahkan dari daftar impor “tidak dibatasi atau dibatasi” menjadi “limbah padat impor yang dilarang”. Pada gelombang pertama, 16 bahan termasuk skrap mobil terkompresi, kapal skrap, plastik yang ditolak dari proses pabrik, botol PET dan peralatan listrik untuk pemulihan logam besi dan non-ferro akan dilarang mulai 31 Desember 2018 (ACLIMAADMIN, 2018).

B. Langkah – Langkah Formal dan Informal untuk Membatasi Pengiriman Sampah Elektronik ke Cina

Dalam hal ini, di Cina sistem pembuangan limbah elektronik Cina didominasi oleh dua pemangku kepentingan yang berbeda namun saling bergantung. Sektor “formal”, terdiri dari pekerja resmi yang terlibat dalam penggunaan kembali dan daur ulang, dan sektor “informal” ialah bagian dari masyarakat. Berpartisipasi dalam kegiatan pembuangan dan daur ulang sampah di luar lembaga publik. Seperti di banyak negara berkembang lainnya, sektor sampah informal Cina mengambil kembali bahan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali yang dibuang oleh sektor masyarakat lainnya. Namun, sektor informal dapat menimbulkan masalah kebijakan yang

serius bagi pemerintah karena kondisi sanitasi dan lingkungan seringkali di bawah standar. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor informal, dalam proses pengelolaan sampah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh penerimaan, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan pemangku kepentingan yang ada secara efisien (Wang, Kuehr, Ahluquist, & Li, 2013).

Berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengelolaan limbah elektronik di Cina berkisar dari organisasi pemerintah, non-pemerintah, dan swasta hingga pendaur ulang informal dan konsumen itu sendiri, yang dibagi di antara berbagai departemen. Tidak ada lembaga utama yang mengoordinasikan proses pengelolaan limbah elektronik, sehingga peran tidak selalu jelas dan beberapa lembaga tumpang tindih.

Kemudian, di luar pemerintah, berbagai pemangku kepentingan seperti perusahaan manufaktur elektronik, perusahaan pengumpulan dan pembuangan limbah elektronik, asosiasi perdagangan, lembaga akademis, dan LSM semuanya memainkan peran penting dalam sistem pembuangan limbah elektronik formal. Meskipun sektor swasta beroperasi terutama dalam sistem limbah elektronik formal yang ditetapkan oleh pemerintah, asosiasi industri dan institusi akademik menghubungkan publik dengan sektor swasta dan mendidik industri tentang proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, dan memainkan peran penting dalam memberikan saran kepada pemerintah lembaga. Di sisi lain, meskipun peran masyarakat sipil dalam isu lingkungan secara umum semakin meluas, namun kiprah LSM di bidang

sampah elektronik masih sangat terbatas. Sebaliknya, aktor internasional seperti *Greenpeace* dan *Basel Action Network* adalah pemimpin utama kegiatan non-pemerintah di sektor limbah elektronik. Secara keseluruhan, pemerintah Cina adalah pemain utama dalam inisiatif limbah elektronik formal.

Selanjutnya, sejauh ini, langkah – langkah yang diambil oleh pemerintah China untuk menangani sektor sampah informal difokuskan pada penutupan kegiatan informal. Salah satu pendekatan paling langsung untuk menjembatani kesenjangan antara sektor pengelolaan sampah formal dan informal adalah dengan mengintegrasikan kegiatan pengumpulan dan daur ulang informal ke dalam industri formal dan membangun kekuatan masing-masing sector dan mengusulkan pendekatan kolaboratif untuk berbagi tanggung jawab.

Dalam hal ini, sektor informal bertanggung jawab atas pengumpulan dan penggunaan kembali limbah elektronik (*e – waste*), sedangkan sektor formal bertanggung jawab atas daur ulang dan pembuangan akhir (*e-waste*) yang dialihkan dari sektor informal ke sektor formal. Kedua sektor ini menjalankan tahapan paralel dari rantai pengolahan limbah elektronik, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir residu (endapan). Pada masa transisi, proses awal pengumpulan dan pembongkaran tetap dilakukan oleh sektor informal, sedangkan sektor formal memfokuskan perannya pada daur ulang dan pembuangan limbah elektronik. Daur ulang informal dan pengumpulan formal telah dihapus, memungkinkan limbah elektronik mengalir langsung

dari sektor informal ke sektor formal. Terakhir, akan dibuat sistem terintegrasi yang menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*).

Selain itu pula, *International Labour Organization* (ILO) melibatkan pengorganisasian pekerja limbah elektronik informal ke dalam koperasi. Hal ini dikarenakan dengan bergabung dalam koperasi, pekerja limbah elektronik (*e-waste*) dapat mengumpulkan lebih banyak bahan yang dapat didaur ulang, sehingga meningkatkan potensi pendapatan mereka. Keuntungan yang lebih tinggi dapat diinvestasikan dalam teknologi yang lebih maju, peralatan pelindung, dan kendaraan pengangkut. Koperasi juga memungkinkan anggota untuk berbagi beban pengumpulan, pembongkaran, pemilahan dan kegiatan lainnya, dan untuk berbagi pengetahuan tentang risiko lingkungan dan kesehatan dari daur ulang limbah elektronik. Ketika bekerja dengan sektor formal, koperasi memungkinkan pekerja limbah elektronik (*e-waste*) informal untuk bernegosiasi dengan “satu suara”, termasuk proses integrasi ke dalam sistem formal. Oleh karena itu, pembentukan koperasi bukan hanya sebagai strategi organisasi untuk memformalkan sektor informal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan yang memungkinkan pekerja informal untuk mempertahankan hak-hak mereka dan memiliki suara kolektif di tingkat pengambilan keputusan (Ignatuschtschenko, 2017).

Kemudian, langkah lainnya yang diambil oleh pemerintah Cina adalah mengeluarkan serangkaian arahan untuk industri untuk melakukan penggunaan kembali dan daur ulang baterai. Diketahui, pada tahun 2015-

2017 melihat pertumbuhan eksplosif penjualan kendaraan energi baru (NEV) di China yang kini membanjiri pasar penggunaan kembali dan daur ulang baterai. Selain itu, di tahun lalu, 3,3 juta kendaraan energi baru terjual, yang memberikan gambaran tentang berapa banyak baterai yang akan digunakan kembali dan didaur ulang antara 2025-2027. Bahkan di sini, angka tersebut hanya mencakup mobil listrik dan beberapa kendaraan listrik lainnya, termasuk lebih dari 400.000 bus listrik, jutaan e-bike dan sepeda motor (meskipun banyak, tetapi tidak semua).

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) yang bertanggung jawab atas perencanaan industri di seluruh Republik Rakyat, mengatakan arahan barunya tentang penggunaan kembali dan daur ulang baterai akan memastikan lebih banyak perlindungan lingkungan, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang sehat (Zhang, Liu, Pang, & dkk, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis yang peneliti tulis, dibagian akhir skripsi penulis akan memaparkan kesimpulan yang didapat dari bab sebelumnya. Yang mana secara umum kebijakan *Operation Green Fence (OGF)* dikeluarkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 untuk mengatasi permasalahan impor sampah bersama pihak bea cukai agar lebih ketat dalam memeriksa konteiner yang masuk ke wilayah cina. Kemudian pada tahun 2017, kebijakan *Operation Nation Sword (ONS)* juga dikeluarkan. Kebijakan ini memberikan larangan impor terhadap 24 kategori limbah padat yang mulai berlaku pada tahun 2018. Melalui *Operation Green Fence (OGF)* Cina mengejutkan pasar daur ulang global ketika mengumumkan tidak akan lagi menerima pengiriman barang daur ulang yang disortir dengan buruk atau kotor dari eksportir asing. Ini merupakan kampanye skala besar pertama Cina untuk menegakkan undang-undang kualitas limbah yang menanggukahkan izin impor untuk 247 perusahaan di bawah kontrol ketat yang mana membuat beberapa pelabuhan harus dihadapi dengan pemeriksaan ketat dari pihak bea cukai.

Kemudian, dalam hal ini juga, pemerintah China juga mengambil langkah – langkah untuk menangani sektor sampah informal difokuskan pada penutupan kegiatan informal. Salah satu pendekatan paling langsung untuk menjembatani kesenjangan antara sektor pengelolaan sampah formal

dan informal adalah dengan mengintegrasikan kegiatan pengumpulan dan daur ulang informal ke dalam industri formal dan membangun kekuatan masing-masing sector dan mengusulkan pendekatan kolaboratif untuk berbagi tanggung jawab.

B. SARAN

1. Kebijakan *Operation Green Fance* diterapkan untuk mengatasi permasalahan Impor sampah, salah satunya sampah elektronik yang lama-kelamaan menyebabkan kerugian bagi negaranya seperti munculnya permasalahan lingkungan dan kesehatan. Kebijakan ini berjalan cukup efektif dilihat dari sebelum pelarangan, 70% WEEE di seluruh dunia diimpor oleh Cina melalui berbagai jalur tetapi masih belum cukup mengatasi permasalahan yang timbul jika Cina masih terus menerus mengimpor sampah, oleh karena itu penulis memberikan saran agar setiap negara dapat mengatasi sendiri permasalahan sampah mereka agar tidak lagi mengimpor sampah terus-menerus terutama sampah elektronik yang proses daur ulangnya terkesan sulit dan panjang.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penstudi HI yang tertarik terhadap isu diluar dari konflik, gender dengan melihat isu lingkungan yang bersifat transnasional sehingga dapat diangkat dalam HI.
3. Penulis akui penelitian ini belum sempurna dan banyak kekurangan

didalamnya, maka diharapkan agar kedepannya terdapat penelitian terkait yang tentunya lebih mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- ACLIMAADMIN. (2018). *China to ban imports of a further 32 waste materials*. From aclima.eus: <https://aclima.eus/en/china-to-ban-imports-of-a-further-32-waste-materials/>
- Adejumo, O., & Oluduro, O. F. (2021). Ticking time bomb: implications of the COVID-19 lockdown on e-waste management in Developing Countries. *UCL Open Environment*.
- Amstutz, M. R. (1995). *International conflict and cooperation : an introduction to world politics*. Madison: Brown & Benchmark.
- Arora, N., & Farge, E. (2020, July 02). *World's e-waste 'unsustainable', says UN report citing China, India and U.S.* From Reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-global-waste-un-report-idUSKBN243255>
- Asia, G. E. (2019, March 22). *Press Release : Live Sustainability*. From Greenpeace: <https://www.greenpeace.org/eastasia/press/1397/chinas-e-waste-worth-23-8-billion-by-2030-2/>
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana.
- Balkevicius, A., Sanctuary, M., & Zvirblyte, S. (2019). Fending off waste from the west: The impact of China's Operation Green Fence on the international Waste Trade. *The World Economy Wiley*, 1-20.
- Berman, R. (2019). *Why American towns are more selective than ever about what they recycle*. From bigthink.com: <https://bigthink.com/the-present/recycling-industry/#rebellitem2>
- Buzan, B., & Waever, O. (2003). *Regions and Powers : The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security : A New Framework of Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Caballero, M., Emmers, A. &., & Acharya, A. (2006). *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*. ASGATE.

- Cao, J., Lu, B., Chen, Y., Zhang, Xuemei, & dkk. (2016). Extended producer responsibility system in China improves e-waste recycling: Government policies, enterprise, and public awareness. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 62*, 882-894.
- Chi, X. S.-P. (2011). Informal electronic waste recycling: a sector review with special focus on China. *Waste management* , 731-742.
- Chi, X., Streicher-Porte, M., Wang, M. Y., & Reuter, M. A. (2011). Informal electronic waste recycling: A sector review with special focus on China. *Waste Management*, 731-742.
- dbs.com. (2019). *Sering Dispelekan, Sampah Elektronik Timbulkan Bahaya Serius*. Retrieved August 12, 2022 from dbs.com: https://www.dbs.com/spark/index/id_id/site/pillars/2019-sering-dispelekan-sampah-elektronik-timbulkan-bahaya-serius.html
- epa.gov. (2014). *Cleaning Up Electronic Waste (E-Waste)*. From epa.gov: <https://www.epa.gov/international-cooperation/cleaning-electronic-waste-e-waste>
- Eugster, M. (2008). Sustainable Electronics and Electrical Equipment for China and the World: A Commodity Chain Sustainability Analysis of Key Chinese EEE Product Chains. *International Institute for Sustainable Development (IISD)*.
- Evans, G., & Newnham, J. (1998). *The Penguin Dictionary of International Relations*. England: Penguin Groups.
- Finnemore, M. (1996). *National Interests in International Society*. New York: Cornell University Press.
- Flower, W. (2016). *What Operation Green Fence has Meant for Recycling*. From waste360.com: <https://www.waste360.com/business/what-operation-green-fence-has-meant-recycling>
- Frey, R. S. (2019). THE E-WASTE STREAM IN THE WORLD-SYSTEM. *Journal of Globalization Studies, Vol. 3 No. 1*, 79–94 .
- Gabrys, J. (2013). *Digital Rubbish : A Natural History of Electronics*. Ann Arbor: University of Michigan.

- Gang Ni, H., & Zeng, E. Y. (2009). Law Enforcement and Global Collaboration are the Keys to Containing E-Waste Tsunami in China. *Environmental Science & Technology Viewpoint*, 3991–3994.
- Go, K., Suzuki, M., & Xiaoxia, Q. (2008). Trial by Fire: A Chinese NGO's Work on Environmental Health Litigation in China. A *CHINA ENVIRONMENTAL HEALTH PROJECT RESEARCH BRIEF*.
- Hao, J., Wang, Y., Wu, Y., & Guo, F. (2020). Metal recovery from waste printed circuit boards: A review for current status and perspectives. *Resources, Conservation and Recycling*.
- Harper, M. (2018). *Global markets and material price updates*. From [www.complydirect.com](https://www.complydirect.com/news/global-markets-and-material-price-updates/): <https://www.complydirect.com/news/global-markets-and-material-price-updates/>
- Hobson, J. (2000). *The State and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Holsti, K. (2012). *National Role Conceptions and Cooperation : A Introduction to World Politics*. Canada: University of British Columbia.
- Hook, L., & Reed, J. (2018). *Why the world's recycling system stopped working*. From [ft.com](https://www.ft.com/content/360e2524-d71a-11e8-a854-33d6f82e62f8): <https://www.ft.com/content/360e2524-d71a-11e8-a854-33d6f82e62f8>
- Ignatuschtschenko, E. (2017). E-waste management in China: bridging the formal. *Journal of Chinese Governance*.
- Jianxin Yang, B. L. (2008). WEEE flow and mitigating measures in China. *Waste Management, Volume 28, Issue 9.*, 1589-1597.
- Katzenstein, P. J. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York : Columbia University Press.
- Kiddee, P., Naidu, R., & Wong, M. H. (2013). Waste Management. *Elsevier*, 1237-1250.
- Liu, X., Tanaka, M., & Matsui, Y. (2006). Electrical and electronic waste management in China: progress and the barriers to overcome. *Waste Management & Research*, 92–101.
- Lu, C., Zhang, L., Zhong, Y., & dkk. (2015). An overview of e-waste management in China. *Journal of Material Cycles and Waste Management*

- Lundgren, K. (2012). *The global impact of e-waste: Addressing the challenge*. Geneva: International Labour Organization .
- Mandelbaum, M. (1996). Foreign Policy as Social Work. *Foreign Affairs* 75, No. 1.
- MBAPOLYMERS.COM. (2013). *How is China's 'Green Fence' affecting the global recycling trade?* From MBAPOLYMERS.COM: <https://mbapolymers.com/news/news-green-fence/>
- Minter, A. (2017). *China's War on Foreign Garbage*. From bloomberg.com: <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-07-20/china-s-war-on-foreign-garbage#xj4y7vzkg>
- Octaviana, A. (2018). *ANALISIS PROSES KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM PELARANGAN SEBAGIAN IMPOR LIMBAH PADAT PADA JANUARI 2018*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Online, E. (2018). *Which Countries Produce the Most E-Waste?* Retrieved August 12, 2022 from Envirotech : [https://www.envirotech-online.com/news/health-and-safety/10/breaking-news/which-countries-produce-the-most-e-waste/46470#:~:text=The%20global%20e%2Dwaste%20leaderboard&text=China%20lead%20the%20way%2C%20with,Germany%20\(1.9\)%20trail%20behind.](https://www.envirotech-online.com/news/health-and-safety/10/breaking-news/which-countries-produce-the-most-e-waste/46470#:~:text=The%20global%20e%2Dwaste%20leaderboard&text=China%20lead%20the%20way%2C%20with,Germany%20(1.9)%20trail%20behind.)
- Onuf, N. (1989). *World of Our Making : Rules and Rule in Social Theory and International Relations* . Columbia: University of South Carolina Press.
- Padelford, N. J., & Lincoln, G. A. (1962). The Dynamics of International Politics. *American Journal of International Law*, 57(2), 469-470.
- Peng, S. L. (2017). *China's plastic demand to rise as foreign garbage ban to curb recycled supply*. From Reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-china-plastics-demand-idUSKCN1BO0J8>
- Perwita, A. A., & Yani, M. Y. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Porter, G., & W., B. J. (1996). *Global Environment Politics*. Boulder, AS: Westview Press.
- Powell, D. (2013). *Finding Solutions to China's E-waste Problem*. From Our World by United Nations University:

<https://ourworld.unu.edu/en/assessing-and-improving-the-e-waste-problem-in-china>

Powell, J. (2020). *Operation Green Fence is deeply affecting export markets*. From resource-recycling.com: <https://resource-recycling.com/recycling/2013/04/12/operation-green-fence-is-deeply-affecting-export-markets/#:~:text=China%20no%20longer%20wants%20to,of%20recovered%20paper%20and%20plastics>.

Puckett, J., Byster, L., Westervelt, Sarah, & dkk. (2002). *Exporting Harm The High-Tech Trashing of Asia*. From <https://web.archive.org/web/20080309044103/http://www.ban.org/E-waste/technotrashfinalcomp.pdf>

Rene, E. R., Seturajan, M., Kumar Ponnusamy, V., & dkk. (2021). Electronic waste generation, recycling and resource recovery : Technological perspectives and trends. *Journal of Hazardous Materials*.

Review, W. M. (2018). *Malaysia, Thailand and Vietnam waste imports crackdown*. From [wastemanagementreview.com](https://wastemanagementreview.com.au/battling-sovereign-risk/): <https://wastemanagementreview.com.au/battling-sovereign-risk/>

Rosyidin, M. (2015). *The Power of ideas : konstruktivisme dalam studi hubungan internasional*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

RTS.COM. (2021, JUNE 21). *The complete e-waste recycling process*. From [rts.com](https://www.rts.com/blog/the-complete-e-waste-recycling-process/): <https://www.rts.com/blog/the-complete-e-waste-recycling-process/>

SCHMITZ, R. (2017). *The Burning Problem Of China's Garbage*. From [npr.org](https://www.npr.org/sections/parallels/2017/02/20/515814016/the-burning-problem-of-chinas-garbage): <https://www.npr.org/sections/parallels/2017/02/20/515814016/the-burning-problem-of-chinas-garbage>

Sebayang, R. (2018). *China Berhenti Jadi Penampung Sampah, Dunia Kebingungan*. From [CNBC Indonesia](https://www.cnbcindonesia.com/news/20180417142645-4-11310/china-berhenti-jadi-penampung-sampah-dunia-kebingungan): <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180417142645-4-11310/china-berhenti-jadi-penampung-sampah-dunia-kebingungan>

Setyani, M. (2020). ANALISIS EKSPOR DAN IMPOR LIMBAH PADAT ANTARA CINA DAN AMERIKA SERIKAT: OPERATION GREEN FENCE (2013) DAN OPERATION NATIONAL SWORD (2018). *Verity - UPH Journal of International Relations*.

- Song, N., McLellan, I., Liu, W., & et.al. (2021). The waste ban in China: what happened next? Assessing the impact of new policies on the waste management sector in China. *Environ Geochem Health*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulovic, V. (2016). Meaning of Security and Theory of Securitization. *Belgrade Center for Security Policy*.
- Tran, T. G., & Matsuda, T. (2021). The Impact of China's Tightening Environmental Regulations on International Waste Trade and Logistics. *Sustainability*.
- Waever, O. (1995). *Securitization and Desecuritization, On Security*. New York: Columbia University Press.
- Walters, A. &. (2008). Evidence of Environmental and Health of Electronics Recycling in China : an Update. *Greenpeace Research Laboratories Technical Note 04/2008*.
- Wang, F., Kuehr, R., Ahluquist, D., & Li, J. (2013). E-Waste in China : A Country Report. *StEP Initiative*.
- Wang, K., Qian, J., & Liu, L. (2020). Understanding Environmental Pollutions of Informal E-Waste Clustering in Global South via Multi-Scalar Regulatory Frameworks : A Case Study of Guiyu Town, China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1-18.
- Williams, M. C. (2013). Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics. *International Studies Quarterly* .
- Yu, J., Williams, E., Ju, M., & Shao, C. (2010). Managing e-waste in China: Policies, pilot projects and alternative approaches. *Resources, Conservation and Recycling*, 991-999.
- Zhang, L., Liu, Y., Pang, B., & dkk. (2020). Second Use Value of China's New Energy Vehicle. *Sustaiability*.

